



E3G

RINGKASAN EKSEKUTIF Juni 2019

BANK PENGEMBANGAN ASIA: BANK IKLIM MASA DEPAN ASIA?

BAGAIMANA BANK PENGEMBANGAN ASIA DAPAT MENYESUAI DENGAN PERJANJIAN PARIS DI INDONESIA, VIETNAM DAN FILIPINA

SONIA DUNLOP, TAM DO MINH, JAMES HAWKINS, SCARLETH NUNEZ, DILEIMY OROZCO, ISKANDER ERZINI VERNIT, HELENA WRIGHT

Ringkasan eksekutif

Bank Pembangunan Asia (ADB) memiliki potensi yang besar untuk menjadi green bank atau 'bank hijau' (bank yang berpihak pada solusi perubahan iklim) di Asia. ADB dapat dan harus menjadi kekuatan pendorong untuk ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di Asia-Pasifik. ADB selama ini telah memberikan bantuan yang cukup besar untuk mengatasi masalah ini, akan tetapi masih lebih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk memenuhi tantangan perubahan iklim dimasa depan. Laporan ini mengkaji bagaimana ADB dapat menyelaraskan peranannya dengan hasil Perjanjian Paris, dengan fokus pada negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Vietnam dan Filipina.

Seperti semua bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Bank – MDB) lainnya, ADB telah berkomitmen untuk menyelaraskan operasinya dengan Perjanjian Paris, termasuk tujuan untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2° C dan mengupayakan untuk membatasinya hingga 1,5° C. Untuk menterjemahkan tujuan global ini ke dalam kebijakan baru di ADB, diperlukan penyesuaian dengan kerangka kerja MDB dalam rangka penyelarasan dengan Perjanjian Paris, dan ini merupakan langkah berikutnya dalam proses ini.

Laporan ini menyajikan serangkaian rekomendasi agar ADB dapat menyelaraskan operasi dan kebijakan energinya dengan Perjanjian Paris di wilayah Asia Tenggara. Karena meningkatnya permintaan energi merupakan inti dari tantangan mitigasi di Asia Tenggara, maka energi dan infrastruktur yang terkait menjadi fokus utama dari laporan ini.



E3G

Tinjauan kebijakan energi ADB yang sedang berjalan, yang akan diterbitkan pada tahun 2020, merupakan peluang penting untuk menanamkan perubahan transformatif dalam operasi dan pinjaman yang terkait dengan bidang energi. Kebijakan energi ADB yang terakhir dikaji sepuluh tahun yang lalu (2009) sudah tidak relevan lagi; sementara kebijakan baru dapat berlaku sampai 2030. Sangat penting untuk dipahami bahwa kebijakan energi berikutnya dimaksudkan agar terjadi keselarasan dengan Perjanjian Paris dan untuk memicu perubahan pada semua tingkat manajemen dan operasi ADB.

Peluang lainnya adalah kepemimpinan baru. Masa jabatan Presiden ADB Takehiko Nakao akan berakhir pada bulan November 2021. Di bawah masa jabatan Presiden Nakao, ADB telah berkembang dan direformasi untuk memiliki fokus yang lebih besar pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu sangat penting untuk ditekankan bahwa penggantinya harus dapat melanjutkan hal ini, dan memastikan bahwa ADB mencapai keselarasan penuh dengan Perjanjian Paris dan mengangkat peran ADB yang berpihak pada solusi perubahan iklim di Asia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan modal masyarakat, ADB memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus mengevaluasi kegiatannya guna memastikan bahwa mereka menggunakan dananya untuk kepentingan publik.

Laporan ini merekomendasikan bahwa ADB perlu menetapkan target baru yang ambisius untuk sepenuhnya memberikan pinjaman kepada kegiatan energi rendah karbon dan efisiensi energi. ADB harus meningkatkan target pendanaan iklimnya dan merevisi definisi energi bersih, khususnya untuk gas alam, karena adanya kekhawatiran akan menimbulkan dampak negatif perubahan iklim. Strategi tingkat negara ADB harus digunakan sebagai bidang utama untuk memastikan keselarasan Paris, dan ADB juga harus memprioritaskan penggunaan jaminan atas pinjaman untuk memaksimalkan mobilisasi modal swasta.

Laporan ini difokuskan pada Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Vietnam dan Filipina, karena negara-negara ini menghadapi risiko pelepasan emisi karbon yang luar biasa yang membahayakan tujuan Perjanjian Paris, serta potensi dekarbonisasi energi yang belum dimanfaatkan secara signifikan. Dalam konteks perubahan iklim, tantangan utamanya adalah bagaimana ADB dapat memenuhi peranannya sebagai 'bank hijau' untuk wilayah Asia Tenggara.

Hingga saat ini, kegiatan ADB telah mendukung banyak proyek rendah karbon di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam dan Filipina. ADB telah menerbitkan dan mempromosikan obligasi hijau, membiayai pengembangan energi terbarukan, mengembangkan pedoman-pedoman menghadapi resiko bencana karena dampak perubahan iklim, dan mendukung proyek percontohan efisiensi energi. Walaupun ADB sendiri tidak dapat memastikan keselarasan Perjanjian Paris di seluruh Asia Tenggara, ADB dapat memastikan negara-negara di wilayah ini telah berada pada jalur pembangunan dekarbonisasi yang baik, dan ADB membantu mengarahkan kembali sektor publik dan swasta ke arah jalur tersebut.



E3G

Terdapat ruang pembelajaran yang cukup dari lembaga pembangunan multilateral dan bilateral lainnya, yaitu dengan mencontoh keberhasilan mereka untuk diterapkan di wilayah Asia. Sebagai salah satu bank pembangunan multilateral, ADB telah bekerja bersama-sama dengan bank pembangunan multilateral lainnya untuk menggunakan pendekatan yang sama dalam menyelaraskan dengan Perjanjian Paris. Saling berbagi pengalaman terbaik merupakan bagian dari proses ini. Laporan ini mengkaji secara rinci dua contoh praktik terbaik, yaitu tentang efisiensi energi dan pendanaan skala mikro. Disamping itu, dilaporkan juga tentang inisiatif lain yang sangat banyak (lebih dari dua lusin), yang mungkin bermanfaat sebagai bahan inspirasi.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan terhadap kinerja ADB yang sedang berjalan yang selaras dengan Perjanjian Paris, tinjauan kebijakan perbankan ke depan terkait dengan masalah energi, dan kinerja ADB di Indonesia, Vietnam dan Filipina. Rekomendasi yang disampaikan relevan dengan kebijakan MDB lainnya. Diharapkan kerjasama dengan Bank Dunia dan para pemangku kepentingan lainnya dapat terus dilanjutkan untuk mencapai visi ADB menjadi 'bank hijau' di Asia.

Berikut adalah tiga rekomendasi utama untuk ADB:

1. ADB harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan pinjaman proyek pengembangan energinya yang akan datang untuk memastikan bahwa seluruh pinjamannya (100%) digunakan untuk proyek bebas karbon dengan menetapkan batas waktu penerapannya, dan menghapuskan pinjaman untuk proyek-proyek yang terkait dengan pengembangan bahan bakar fosil yang tidak terkendali;
2. ADB perlu menjadikan efisiensi energi sebagai prioritas infrastruktur dan harus mempertimbangkan untuk menetapkan target pinjaman efisiensi energi tertentu; dan
3. ADB harus lebih spesifik menanyakan bagaimana pinjamannya akan memberikan kontribusi terhadap target penurunan emisi yang ambisius yang dilakukan setiap negara, yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Paris.

Adapun rekomendasi untuk menjadi 'bank hijau' di Asia adalah sebagai berikut:

ADB memiliki potensi untuk memainkan peran yang menentukan dalam transisi menuju pembangunan ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim di Asia Tenggara dan sekitarnya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan modal publik, ADB memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kegiatan debitor untuk memastikan mereka menggunakan pinjamannya untuk kepentingan publik. Untuk mencapai keselarasan dengan Perjanjian Paris, dan membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ADB harus mempertimbangkan rekomendasi yang didasarkan pada bukti dan penelitian yang disampaikan dalam laporan ini.



E3G

Rekomendasi ini sebagian besar difokuskan pada sektor energi, dengan beberapa relevansi untuk sektor transportasi dan infra struktur. Untuk evaluasi yang lebih komprehensif tentang keselarasan dengan tujuan mitigasi dan adaptasi dari Perjanjian Paris, diperlukan penelitian dan rekomendasi lebih lanjut, termasuk bagaimana menangani kegiatan ADB di sektor lain yang relevan dengan perubahan iklim, seperti pertanian, penggunaan lahan dan air.

Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini dibagi ke dalam empat katagori, yaitu:

1. Target dan komitmen
2. Efisiensi energi
3. Kebijakan penurunan emisi pada tingkat negara
4. Instrumen pendanaan

1. Rekomendasi terkait target dan komitmen:

1.1. ADB harus melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan energi yang akan datang, untuk menetapkan target waktu digunakannya seluruh pinjaman (100%) untuk proyek energi bebas karbon, dan menghapuskan pinjaman untuk proyek-proyek terkait fosil yang tidak terkendali. Hal ini dilakukan dengan melalui proses penyaringan yang lebih ketat untuk proyek-proyek yang diusulkan. Kebijakan energi ADB juga harus ditinjau lebih sering, misalnya setiap lima tahun sekali dan bukan setiap 10 tahun sekali seperti saat ini;

1.2. ADB perlu mengubah definisi dan menetapkan target yang lebih ambisius untuk investasi energi bersih. Saat ini, target tsb masih termasuk gas alam yang dianggap sebagai 'energi bersih', yang sebetulnya kurang tepat. Untuk membantu transparansi ini, dimasa depan ADB juga harus mempertimbangkan kriteria investasi berkelanjutan menurut taksonomi Uni Eropa, yang dirancang untuk digunakan secara global; dan

1.3. Target pendanaan perubahan iklim ADB sebesar USD 6 miliar per tahun harus ditingkatkan secara signifikan sesuai dengan target yang diminta dalam Perjanjian Paris. ADB, sebagai MDB pertama yang menetapkan target pendanaan yang terus meningkat, sesuai dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 (sebuah contoh praktik yang baik diantara MDB utama), seharusnya dicatat dan dilaporkan oleh Bank Dunia setiap tahunnya.

2. Rekomendasi terkait efisiensi energi:

2.1. ADB perlu menjadikan efisiensi energi sebagai prioritas infrastruktur dan harus mempertimbangkan untuk menetapkan target pinjaman efisiensi energi tertentu. ADB telah menerapkan berbagai proyek efisiensi energi, dan saat ini kegiatan tsb perlu ditingkatkan mengingat permintaan energi yang meningkat dan intensitas penggunaan energi yang tinggi di wilayah Asia. ADB memiliki peran penting dalam mengintervensi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya

permintaan energi. Efisiensi energi harus dijadikan bagian inti dari tinjauan kebijakan energi ADB yang akan datang;

2.2. ADB harus berupaya untuk belajar dari pengalaman terbaik MDB lain di seluruh dunia, seperti European Bank for Reconstruction and Development -EBRD (Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan) yang telah berhasil dengan program efisiensi energinya. ADB juga harus melanjutkan dan meningkatkan promosi Energy Service Company (ESCO) yang dikembangkan untuk pembiayaan efisiensi energy; dan

2.3. Diperlukan lebih banyak transparansi dalam pelaporan tingkat proyek mengenai efisiensi energi, terutama mengingat pernyataan bahwa pinjaman efisiensi energi ADB lebih tinggi dibandingkan dengan energi terbarukan pada tahun 2015. Diperlukan lebih banyak informasi tentang definisi efisiensi energi menurut ADB.

3. Rekomendasi terkait kebijakan penurunan emisi pada tingkat negara:

3.1. ADB harus lebih spesifik dalam menyampaikan persyaratan bantuan yang akan diberikan kepada setiap negara, khususnya tentang bagaimana bantuan tsb akan mendukung target penurunan emisi yang ambisius melalui implementasi NDC di bawah Perjanjian Paris;

3.2. ADB harus selaras dengan tujuan mitigasi global Perjanjian Paris dengan berusaha membawa Strategi Kemitraan Negara yang sejalan, tidak hanya dengan NDC saja, tetapi juga dengan jalur yang selaras dengan Perjanjian Paris hingga bisa mencapai target penurunan kenaikan temperatur jauh di bawah 2° C dan mengejar upaya penurunan menuju 1,5° C. Perencanaan dekarbonisasi jangka panjang dan penghentian bahan bakar fosil perlu menjadi bagian dari Strategi Kemitraan Negara. Hal ini telah dilakukan sampai batas tertentu dengan Vietnam. Tujuan serupa harus dimasukkan dalam Strategi Kemitraan Negara untuk Indonesia dan Filipina;

3.3. Pedoman Strategi Kemitraan Negara secara umum yang terakhir telah direvisi pada tahun 2015. Karena itu perlu diperbarui dengan mempertimbangkan Kerangka Kerja dan Strategi Operasional Perubahan Iklim ADB 2030. Pada saat ini, pedoman tsb hanya membuat satu referensi kecil untuk perubahan iklim. Padahal ini merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa perubahan iklim diutamakan dalam setiap bagian dari operasi ADB;

3.4. Dalam melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan di Vietnam dan Indonesia, ADB harus berupaya untuk mendorong Kementerian tsb bergabung dengan the Coalition of Finance Ministers for Climate Action, seperti yang telah dilakukan Filipina. Hal yang sama harus dilakukan untuk mendorong Bank Sentral di wilayah Asia untuk bergabung dengan the Network for Greening the Financial System; dan

3.5. ADB harus mendukung inisiatif tentang keuangan berkelanjutan di kawasan ini seperti Inisiatif Pendanaan Berkelanjutan Indonesia (Indonesia's Sustainable Finance Initiative) dan the Asia Sustainable Finance Initiative. Hal ini harus digunakan sebagai



E3G

peluang untuk mengintegrasikan risiko dan peluang perubahan iklim ke dalam agenda pendanaan yang berkelanjutan.

4. Rekomendasi tentang instrumen pendanaan:

4.1. ADB harus meningkatkan penggunaan jaminannya karena memiliki potensi yang lebih besar untuk memobilisasi pendanaan pihak swasta. ADB juga dapat memberikan dukungannya kepada bank-bank nasional dalam mengembangkan mekanisme pembiayaan kembali dalam mata uang lokal sehingga mereka dapat menyediakan keuangan terkait perubahan iklim jangka panjang;

4.2. ADB harus meningkatkan dukungan yang diberikannya kepada setiap negara terkait manajemen risiko iklim, melalui skema asuransi risiko iklim dan asuransi mikro yang inovatif;

4.3. ADB dan MDB lain di kawasan tersebut harus meningkatkan penggunaan obligasi hijau atau iklim sebagai alat untuk membuka lebih banyak pendanaan perubahan iklim, sesuatu yang telah digunakan ADB, IFC, dan lembaga pendanaan lainnya di wilayah tersebut.

Rekomendasi ini akan diajukan sebagai bagian dari proses umpan balik ADB tentang Strategi 2030 prioritas operasionalnya.

Informasi lebih lanjut: **SHIFT SEA**

(<https://www.e3g.org/library/shift-SEA-financial-flows-investing-low-carbon-development-southeast-asia>)

Supported by:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

based on a decision of the German Bundestag



E3G

Tentang E3G

E3G adalah think tank perubahan iklim independen yang mempercepat transisi ke dunia yang aman iklim. E3G membangun koalisi lintas-sektoral untuk mencapai hasil yang ditentukan dengan cermat, dipilih karena kapasitasnya untuk memanfaatkan perubahan. E3G bekerja erat dengan mitra yang berpikiran sama di pemerintahan, politik, bisnis, masyarakat sipil, ilmu pengetahuan, media, yayasan kepentingan publik dan di tempat lain. Pada tahun 2018, untuk tahun ketiga berturut-turut, E3G menempati peringkat kelima think tank lingkungan paling berpengaruh secara global.

Informasi lebih lanjut tersedia di www.e3g.org

Hak cipta

Karya ini dilisensikan dengan Lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0.

© E3G 2019